

Peran Pemerintah Desa Pucangsari Dalam Menjalankan Program Kabupaten Layak Anak Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Institusi

Risky Amalia
Universitas Yudharta Pasuruan
Email: *amaliamansur30@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Desa Pucangsari dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pendekatan teori institusional W. Richard Scott, yang meliputi tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan budaya kognitif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, kepala sekolah PAUD, guru, serta orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek regulatif, Desa Pucangsari belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan tertulis yang mengatur PAUD secara formal, sehingga dukungan yang diberikan masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Pada aspek normatif, terdapat komitmen moral dari pemerintah desa yang diwujudkan melalui bantuan fasilitas, insentif guru, serta pelaksanaan kegiatan seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), meskipun belum dilembagakan secara struktural. Sementara itu, pada aspek budaya kognitif, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap pentingnya PAUD. Banyak orang tua belum menyekolahkan anak karena alasan pekerjaan, tidak adanya pengantar, serta persepsi bahwa PAUD hanya tempat bermain. Dari ketiga pilar tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran regulasi formal dan lemahnya kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor utama rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan regulasi, penguatan nilai normatif, dan edukasi masyarakat untuk membentuk budaya sadar pendidikan sejak usia dini.

Kata kunci: Pemerintah, Pucangsari, Layak Anak, Pendidikan, Anak, Usia Institusi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Desa Pucangsari dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pendekatan teori institusional W. Richard Scott, yang meliputi tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan budaya kognitif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, kepala sekolah PAUD, guru, serta orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek regulatif, Desa Pucangsari belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan tertulis yang mengatur PAUD secara formal, sehingga dukungan yang diberikan masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Pada aspek normatif, terdapat komitmen moral dari pemerintah desa yang diwujudkan melalui bantuan fasilitas, insentif guru, serta pelaksanaan kegiatan seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), meskipun belum dilembagakan secara struktural. Sementara itu, pada aspek

budaya kognitif, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap pentingnya PAUD. Banyak orang tua belum menyekolahkan anak karena alasan pekerjaan, tidak adanya pengantar, serta persepsi bahwa PAUD hanya tempat bermain. Dari ketiga pilar tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran regulasi formal dan lemahnya kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor utama rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan regulasi, penguatan nilai normatif, dan edukasi masyarakat untuk membentuk budaya sadar pendidikan sejak usia dini.

Kata kunci: Pemerintah, Pucangsari, Layak Anak, Pendidikan, Anak, Usia Institusi

Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini adalah tahap awal yang kritis dalam perkembangan seorang anak. Pada periode ini, anak mengalami pertumbuhan dan pembelajaran yang pesat, sehingga penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang tepat sejak dini. Pendidikan anak usia dini memainkan peran penting dalam membentuk masa depan anak. Dengan memberikan kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Ini juga mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutan dan memberikan dasar yang kokoh untuk kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan anak usia dini adalah investasi yang berharga untuk memastikan anak-anak memiliki masa depan yang cerah dan berhasil dalam kehidupan.

Sebagai generasi penerus bangsa, negara sudah selayaknya memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Hal tersebut di wujudkan salah satunya dengan menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang akan menjadi salah satu unkkеberhasilan perlindungan hukum di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam mengembangkan KLA terdapat indikator mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Dalam rangka memenuhi KLA tersebut diperlukan partisipasi Desa untuk mewujudkannya sehingga diperlukan pembentuka Desa Layak Anak. Dengan menciptakan Desa Layak Anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, pengarusutamaan gender, kabupaten layak anak, pendanaan, peran serta masyarakat, pemantauan, evaluasi, pelaporan, sanksi administrasi. Demi mewujudkan Kabupaten/ Kota Layak Anak maka tidak bisa dipisahkan dari peran serta dan partisipasi dari masing-masing desa yang berada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Dengan demikian perlu kiranya tercipta Desa Layak Anak yang akan mendukung terwujudnya

Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian dibutuhkan penguatan untuk menciptakan Desa Layak Anak terdapat 3 elemen institusi yang bisa membangun penguatan tersebut Menurut Scott (2008:28) elemen tersebut berupa regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan penguatan institusi pada lembaga pendidikan anak usia dini dan pemerintah desa tidak bisa dilepaskan dari elemen-elemen tersebut.

Berdasarkan peraturan bupati (Perbup) pasuruan nomor 15 pasal 10 ayat 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Pembentukan desa layak anak menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pengembangan kabupaten layak anak dalam kaitanya dengan pendidikan anak usia dini, dalam hal ini penulis akan membahas tentang peran pemerintah desa dalam menjalankan program kabupaten layak anak pada pendidikan anak usia dini dalam perspektif institusi.

Jumlah balita	Jumlah siswa PAUD
61	20

tabel 1. 1 Jumlah Balita dan Siswa PAUD Desa Pucangsari 2024

Sumber: pemerintah desa pucangsari tahun 2024

Pada tabel tersebut sudah jelas bahwa pendidikan anak usia dini di desa pucangsari pada tahun 2024 siswa yang belajar di PAUD Arummanis rendah berjumlah 20 dengan data seluruh anak balita di usia 4 tahun berjumlah 61 balita di Desa Pucangsari. Dalam hal ini Pentingnya peran pemerintah desa dalam menjalankan program kabupaten layak anak, seperti yang ada pada desa pucangsari pada tahun 2024 mengalami rendahnya partisipasi masyarakat pada program KLA khususnya pada PAUD, kondisi ini mendorong perlunya penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana peran pemerintah desa dalam menjalankan program kabupaten layak anak pada pendidikan anak usia dini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan terhadap anak, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada evaluasi formatif dan sumatif terhadap pelaksanaan program Jobfair di Kabupaten Pasuruan. (Sugiono, 2011) Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam proses, kendala, serta capaian dari program Jobfair sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran. Jenis evaluasi yang digunakan mengacu pada model evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk menilai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan Jobfair, mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat pencari kerja, keterlibatan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta perusahaan peserta. Sementara itu, evaluasi sumatif digunakan untuk menilai hasil akhir dan dampak program, seperti jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap, efektivitas program dalam memperluas akses informasi lowongan kerja, dan persepsi masyarakat terhadap kebermanfaatan kegiatan tersebut. (Sugiono, 2017)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, panitia penyelenggara Jobfair, perwakilan perusahaan peserta, pencari

kerja yang terlibat, serta masyarakat yang menjadi sasaran program. Observasi dilakukan pada saat penyelenggaraan Jobfair untuk memperoleh data langsung mengenai dinamika kegiatan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung, seperti laporan kegiatan, jumlah peserta, serta data statistik ketenagakerjaan daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, serta data dokumentasi yang diperoleh. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program Jobfair di Kabupaten Pasuruan, baik dari segi proses pelaksanaan maupun hasil yang dicapai, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang. (Sugiono, 2020)

Hasil dan Pembahasan

A. Administrasi Publik

Menurut James W. Fesler, administrasi publik adalah suatu proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pengelolaan kebijakan publik oleh aparatur birokrasi, terutama dalam lingkup yang luas dan kompleks, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Administrasi publik menurut Fesler tidak hanya berkaitan dengan tata kelola teknis pemerintahan, tetapi juga mencerminkan bagaimana institusi publik merancang kebijakan berdasarkan aspirasi publik, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan melaksanakan kebijakan tersebut melalui struktur birokrasi yang sistematis dan terorganisir. Dalam pandangannya, keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, transparansi proses, serta profesionalisme aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan yang responsif, akuntabel, dan efisien kepada masyarakat.

Administrasi publik dapat dipahami sebagai rangkaian proses dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA), administrasi publik berperan sebagai landasan utama yang memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan kebijakan yang dirancang oleh otoritas pusat dan daerah. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Gulick, efektivitas program pemerintah sangat ditentukan oleh komponen POSDCORB—yakni perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran—yang menjadi kerangka operasional dalam manajemen sektor publik. Dalam penerapan Program KLA, khususnya pada layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), fungsi administrasi publik membantu mengubah kebijakan berskala nasional menjadi langkah konkret di tingkat lokal dengan menekankan pada perencanaan yang sistematis, pengelolaan sumber daya, serta pengendalian pelaksanaan yang optimal. (Tanjung, 2022)(Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik & Lilik Ekowanti, 2022)

Sebagai unit pemerintahan terendah, pemerintah desa memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan Program KLA pada sektor PAUD melalui praktik administrasi publik yang akuntabel dan adaptif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa. Namun, terdapat tantangan nyata dalam penerapan inisiatif seperti Program Satu Desa Satu PAUD, khususnya di daerah terpencil, yang menghadapi kendala sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, pembiayaan terbatas,

serta hambatan geografis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat kapasitas administrasi publik melalui inovasi dalam mekanisme pendanaan, penyesuaian kurikulum yang berbasis pada nilai dan kondisi lokal, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pendekatan yang mengakomodasi norma dan budaya setempat. (Sintesis et al., n.d.)

Dalam kerangka institusional, administrasi publik tidak hanya menekankan pada aspek teknis seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga mencakup nilai-nilai normatif seperti kepercayaan publik dan tanggung jawab pemerintahan. Pendekatan ini memosisikan pemerintah desa sebagai institusi formal yang memiliki peran krusial dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak dasar mereka melalui implementasi Program KLA. Misalnya, pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 mengenai pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan PAUD, memerlukan evaluasi mendalam dengan model CIPP (konteks, input, proses, produk) agar sesuai dengan realitas sosial dan budaya desa. Dalam proses pengarusutamaan PAUD dalam kebijakan pendidikan nasional, pendekatan institusional menjadi alat analisis yang efektif untuk mengidentifikasi hambatan lokal serta merumuskan strategi yang kontekstual guna mendorong partisipasi PAUD secara menyeluruh dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. (Nurkolis et al., 2023)

B. Manajemen Administrasi

Manajemen administrasi Menurut **George R. Terry**, dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas yang terstruktur, mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk meraih sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta berbagai sumber daya lainnya secara optimal dan efisien. Manajemen administrasi dalam implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) di tingkat desa sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola kelembagaan serta keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai pelaksana utama. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengatur dan mengelola berbagai sumber daya administratif, seperti pendataan anak, pemetaan layanan PAUD, dan menjalin koordinasi lintas sektor—meliputi bidang kesehatan dan perlindungan anak. Dari sudut pandang institusional, keberhasilan pengelolaan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat struktur organisasi desa dan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program yang berpihak pada kepentingan anak usia dini.

Selanjutnya, peran kelembagaan desa dalam program KLA mencerminkan praktik *local governance*, di mana sinergi antara kebijakan nasional, kapasitas internal desa, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Administrasi publik yang tertata dengan baik akan memperkuat tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program PAUD yang responsif terhadap kebutuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan institusional yang komprehensif, seperti pembentukan gugus tugas desa layak anak serta penerapan sistem pemantauan berbasis indikator KLA yang telah ditetapkan secara nasional. Konsep ini selaras dengan teori institusional yang menekankan pentingnya norma dan struktur dalam membentuk perilaku dan efektivitas organisasi pemerintahan.

C. Institusi Dan Organisasi Sektor Publik

Institusi merupakan aturan-aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi (North, 1991). Institusi juga dapat didefinisikan sebagai aturan rambu-rambu yang digunakan bagi para anggota suatu

kelompok masyarakat sebagai panduan untuk mengatur hubungan yang saling mengikat dan ketergantungan satu sama lain (ostom, 1986). Burki dan perry (1998) juga mengatakan bahwa institusi merupakan sekumpulan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakan yang membentuk individu dan organisasi masyarakat. Dalam aturan formal mencakup hukum, konstitusi, regulasi, kontrak, standar, dan adapun yang bersifat spesifik dan didefinisikan secara lengkap. Sementara itu aturan informal mencakup budaya dalam masyarakat serta mengarah pada perilaku dan tindakan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah norma perilaku, aturan adat, norma politik, norma sosial, etika, nilai-nilai, dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

Teori institusi dibangun dari 3 elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan penguatan institusi pada lembaga pendidikan anak usia dini dan pemerintah desa tidak bisa dilepaskan dari elemen-elemen tersebut Scott (2008:28). Pada 3 elemen tersebut dijelaskan regulatif merupakan suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, peraturan tersebut terdiri dari kekuatan, kebijakan-kebijakan, dan sanksi yang telah dibuat oleh lembaga itu. Artinya dengan regulatif tersebut, maka memungkinkan lembaga tersebut dalam aksinya dapat memberikan lisensi, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga itu sendiri. Normatif merupakan suatu konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma tersebut merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Norma dapat membangkitkan suatu perasaan kuat untuk para anggota dari lembaga tersebut.

Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan dalam mempengaruhi stabilitas sosial dan norma-norma yang baik bagi masyarakat. Dan budaya kognitif merupakan pemikiran tentang suatu budaya yang ada dalam lembaga. Kognitif budaya diantaranya berisi tentang paham, Keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf. Kognitif dalam makna budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normatif. Dapat dijabarkan bahwa institusi mempunyai nilai-nilai dalam suatu tatanan kelembagaan yang sulit dilepaskan dengan kehidupan sosial masyarakat. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya (Sujarweni 2015:3). Organisasi sektor publik juga memiliki ciri-ciri yang menjadikan organisasi tersebut unik dan berbeda dari lainnya ada 4 ciri-ciri menurut (Nordiawan 2009:2)

1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
2. Dimiliki secara kolektif oleh publik.
3. Kepemilikan atau sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.
4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.

D. Pengembangan institusi sektor public

Pengembangan sektor publik dalam mendukung program Kabupaten Layak Anak memerlukan peran pemerintah desa sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut teori institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008), institusi dalam sektor publik terdiri dari tiga elemen utama, yaitu regulatif, normatif, dan budaya-kognitif. Elemen regulatif mencakup kebijakan dan peraturan yang mengatur pengelolaan desa dan lembaga pendidikan anak usia dini

(PAUD), seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Elemen normatif mencerminkan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat, termasuk partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Sementara itu, elemen budaya-kognitif berkaitan dengan pemahaman kolektif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Pengembangan sektor publik di tingkat desa juga sejalan dengan konsep reformasi administrasi yang dikemukakan oleh Yuwono (2003), yang menekankan pentingnya partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas, dan kepemimpinan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penguatan institusi dalam lembaga PAUD dan pemerintahan desa diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan berbasis hak anak yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor pokok, yaitu a) komitmen bersama seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi, b) kepemimpinan yang kondusif, merupakan salah satu hal yang mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan pembangunan kapasitas, baik personal maupun kelembagaan sebuah organisasi, c) reformasi peraturan, untuk tersedianya perundangan yang baik dan faktual guna mengurangi hambatan-hambatan legal formal pembangunan kapasitas, d) reformasi kelembagaan yang intinya menunjuk pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan urusan organisasi menuju realisasi tujuan, e) dan pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yaitu identifikasi kapasitas yang dimiliki guna menentukan titik tolak pengembangan yang diproyeksikan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya pengembangan kapasitas sektor publik yaitu partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas dan kepemimpinan. Partisipasi dimaksud adalah keterlibatan semua aktor terkait dalam program yang dijalankan. Inovasi diperlukan untuk menemukan alternatif dan metode yang tepat dalam proses pengembangan kapasitas. Partisipasi yang baik, dan kreativitas berinovasi dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengakses informasi baik secara internal maupun eksternal organisasi. Akuntabilitas sebagai media pengendali pelaksanaan program sehingga mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan sebagai syarat terakhir berperan sebagai penggerak, pengarah dan pengendali setiap tahapan proses pelaksanaan program. Kepemimpinan yang ideal harus mengedepankan keterbukaan, penerimaan terhadap ide-ide baru, kejujuran, perhatian, penghormatan terhadap harkat dan martabat, serta penghormatan kepada orang lain. Menurut Yuwono (2003).

E. Dinamika Institusi Dalam Organisasi Sektor Publik

Dinamika institusi dalam organisasi sektor publik mencerminkan bagaimana aturan, struktur, dan norma di dalamnya terus berkembang serta menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Scott (2008) mengemukakan bahwa institusi sektor publik terdiri dari tiga elemen utama, yaitu regulatif, normatif, dan budaya-kognitif. Elemen regulatif menurut Miriam Budiardjo mencakup kebijakan publik yang bertujuan membatasi atau memandu tindakan individu atau kelompok agar sesuai norma dan hukum. Sementara itu, elemen normatif menurut John Rawls teori yang menjelaskan bagaimana institusi sosial seharusnya diatur untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Adapun elemen budaya-kognitif menurut Stephen A. Tyler sistem makna yang

digunakan individu untuk memahami dunia melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh budaya tempat ia hidup.

Upaya memperkuat institusi pada lembaga PAUD dan pemerintah desa di Pucangsari, dinamika institusi tampak melalui bagaimana kebijakan yang diterapkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi. North (1991) berpendapat bahwa institusi berperan sebagai aturan yang membentuk interaksi sosial dan ekonomi, yang dalam sektor publik diwujudkan melalui regulasi dan praktik tata kelola yang baik. Implementasi kebijakan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencerminkan bagaimana regulasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan sektor publik. Selain itu, perubahan dalam alokasi sumber daya, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi antara aktor pemerintah dan sektor swasta menjadi bagian dari dinamika institusi yang menentukan efektivitas dalam mendukung program Kabupaten Layak Anak. Beberapa tantangan yang muncul meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perbedaan pemahaman di antara aktor-aktor pemerintahan desa mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.

Pendekatan dalam mengelola dinamika institusi sektor publik dapat dikaitkan dengan teori adaptasi kelembagaan yang dikemukakan oleh Ostrom (1986), yang menegaskan bahwa institusi yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks PAUD dan pemerintah desa, adaptasi dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola yang berbasis partisipasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam pelayanan publik. Yuwono (2003) juga menekankan bahwa reformasi administrasi sektor publik memerlukan keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta kepemimpinan yang visioner agar dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan institusi di tingkat desa tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dan lembaga pendidikan dalam berinovasi, menjalin kerja sama, serta membangun kesadaran kolektif guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

F. Hubungan Antara Institusi Dengan Kinerja Organisasi Sektor Publik

Institusi dalam konteks sektor publik merujuk pada struktur formal dan informal yang mengatur perilaku, norma, nilai, serta aturan main di dalam organisasi, termasuk lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pemerintah desa. Kinerja organisasi sektor publik sendiri diukur dari efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. (Akadira, 2022). Hubungan antara institusi dan kinerja organisasi sektor publik sangat erat. Institusi yang kuat akan membentuk tata kelola yang baik, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal ini terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi sektor publik, karena mampu mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. (Anggriany & Hasnawati, 2023). Selain itu, institusi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi akan lebih mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Teori institusi menekankan bahwa organisasi publik harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal melalui pertukaran nilai, norma, dan aturan, sehingga dapat meningkatkan kinerja

dan relevansi layanan yang diberikan. Beberapa faktor institusional yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik antara lain:

1. **Komitmen Manajemen:** Komitmen pimpinan dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sangat menentukan keberhasilan kinerja organisasi, seperti yang terlihat pada peningkatan nilai SAKIP di Ditjen PAUD.
2. **Sistem Pengendalian Internal:** Penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi organisasi. (Farnisa Wahida et al., 2023)
3. **Budaya Inovasi:** Institusi yang mendorong budaya inovasi akan lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. (Suriadi & Frinaldi, 2023) (Wardana & Frinaldi, 2024)
4. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Pengelolaan SDM yang efektif, termasuk pelatihan dan pengembangan, berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja layanan publik. (Reskiani et al., 2024)

Hubungan antara institusi dan kinerja organisasi sektor publik bersifat saling menguatkan. Institusi yang kuat, adaptif, dan inovatif akan mendorong tercapainya kinerja organisasi yang efektif, efisiensi, dan akuntabel. Dalam konteks penguatan lembaga PAUD dan pemerintah desa, penguatan institusi menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan program Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan.

G. Kerjasama Institusi Dan Lembaga Pendidikan

Kerjasama institusi dalam konteks pendidikan anak usia dini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung program pemerintah seperti Kabupaten Layak Anak. Menurut teori institusional yang dikemukakan oleh Scott (2008), keberhasilan kolaborasi ini didasarkan pada tiga elemen: regulatif, normatif, dan budaya-kognitif. Elemen regulatif mencakup kebijakan dan peraturan yang mengatur kerja sama antar lembaga, elemen normatif terkait nilai dan norma sosial, sementara elemen budaya-kognitif mencerminkan pemahaman kolektif masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk generasi yang berkualitas. Menurut Ostrom (1986), kerja sama institusi melibatkan pengaturan formal dan informal yang mengatur interaksi antar organisasi. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya, tanggung jawab, dan peran masing-masing institusi dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, North (1991) menyatakan bahwa kerja sama institusi dipengaruhi oleh aturan formal seperti regulasi, serta norma informal yang berkembang dalam masyarakat.

Model kerja sama antar institusi dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti kolaborasi formal dengan perjanjian kerja sama, atau kolaborasi informal yang mengandalkan kepercayaan dan tujuan bersama. Contoh kolaborasi ini adalah kemitraan antara lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pemerintah desa dalam mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak. Teori institusional juga menyebutkan bahwa pengaturan kerja sama dapat mencakup aturan formal seperti regulasi, serta aturan informal yang mengatur norma dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama antara lembaga pendidikan dan institusi publik mencakup kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam memastikan kelancaran kolaborasi, sementara komunikasi yang baik memfasilitasi koordinasi antar lembaga. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam memastikan

keberhasilan program pendidikan anak usia dini dan mendukung tercapainya tujuan kebijakan pemerintah.

Faktor lingkungan organisasi dan dinamika perubahannya memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas serta kemampuan adaptasi organisasi sektor publik, termasuk dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta implementasi program Kabupaten Layak Anak. Menurut teori kontingensi yang dikemukakan oleh Donaldson (2001), kinerja suatu organisasi sangat bergantung pada keselarasan antara struktur organisasi dan perubahan lingkungan eksternal. Lingkungan organisasi ini mencakup faktor internal, seperti kebijakan kelembagaan, kepemimpinan, dan budaya kerja, serta faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah, dinamika sosial, dan tingkat dukungan masyarakat. Scott (2008) menegaskan bahwa perubahan lingkungan organisasi berkaitan erat dengan tiga elemen utama institusi, yaitu regulatif (perubahan dalam kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi tata kelola PAUD), normatif (evolusi nilai dan standar sosial yang membentuk ekspektasi masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini), serta budaya-kognitif (transformasi persepsi dan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini). Dalam konteks pemerintah desa dan lembaga PAUD di Pucangsari, faktor lingkungan yang berperan meliputi kebijakan daerah terkait Kabupaten Layak Anak, perubahan dalam alokasi dana desa guna mendukung pendidikan anak usia dini, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendorong keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan perspektif teori institusional, North (1991) menegaskan bahwa organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan, sedangkan organisasi yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika eksternal berisiko mengalami stagnasi. Dalam konteks pengelolaan PAUD dan implementasi program Kabupaten Layak Anak, fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting guna menjamin keberlanjutan program. Robbins dan Judge (2017) menyoroti bahwa perubahan lingkungan yang cepat menuntut organisasi sektor publik untuk memiliki kepemimpinan yang adaptif, menerapkan manajemen perubahan yang efektif, serta menyusun strategi berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, perubahan kebijakan dalam alokasi Dana Desa untuk pembangunan fasilitas PAUD mencerminkan pentingnya responsivitas organisasi sektor publik terhadap kebutuhan masyarakat serta regulasi yang terus berkembang. Selain itu, meningkatnya kesadaran sosial mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini turut mempengaruhi tuntutan akan layanan PAUD yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, organisasi sektor publik harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan agar dapat memberikan layanan yang optimal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

H. Peran Pemerintah Desa Pucangsari Dalam Menjalankan Program Kabupaten Layak Anak Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Institusi

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan faktor penting yang mencerminkan kesadaran kolektif dan keberpihakan sosial terhadap masa depan generasi. Namun, berdasarkan temuan lapangan di Desa Pucangsari, terlihat bahwa partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke PAUD masih tergolong rendah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara lemahnya kebijakan formal, rendahnya komitmen struktural, dan pola pikir masyarakat yang belum terbentuk sepenuhnya terhadap pentingnya

pendidikan usia dini. Dalam perspektif teori institusional W. Richard Scott, hal ini dapat dianalisis melalui tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan budaya kognitif—yang dalam praktiknya saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.

Pertama, dari aspek regulatif, hingga saat penelitian dilakukan, Desa Pucangsari belum memiliki peraturan tertulis atau kebijakan resmi yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan PAUD. Tidak ditemukan adanya Peraturan Desa (Perdes), Surat Keputusan Kepala Desa, atau dokumen administratif lainnya yang mengatur teknis, anggaran, ataupun tanggung jawab penyelenggaraan PAUD secara struktural. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan kelembagaan PAUD di desa menjadi tidak memiliki legitimasi kuat dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. PAUD berjalan lebih karena inisiatif masyarakat dan tenaga pendidik, bukan sebagai bagian dari sistem desa yang terstruktur. Hal ini berpengaruh langsung terhadap rendahnya partisipasi masyarakat karena mereka tidak melihat PAUD sebagai program prioritas atau kewajiban sosial yang harus diikuti. Masyarakat melihat PAUD hanya sebagai pilihan tambahan, bukan kebutuhan pendidikan dasar anak.

Kedua, dalam aspek normatif, pemerintah desa sebenarnya telah menunjukkan bentuk kepedulian dan dukungan moral terhadap PAUD, meskipun belum diikuti dengan formalitas kebijakan. Dukungan ini terlihat dari alokasi dana desa untuk kebutuhan operasional PAUD seperti perbaikan fasilitas, penyediaan alat permainan edukatif, pemberian insentif bagi guru, serta pengadaan program seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Ini menunjukkan bahwa secara nilai dan kesadaran sosial, aparatur desa mengakui pentingnya PAUD sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Namun, komitmen tersebut masih bersifat normatif atau sebatas niat baik dan perhatian pribadi dari kepala desa dan perangkatnya, belum menjadi norma yang terlembagakan. Tanpa kebijakan tertulis dan sistem yang mengikat, dukungan itu berpotensi tidak konsisten dan tidak berkelanjutan apabila terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas desa.

Ketiga, aspek budaya kognitif menjadi dimensi paling mendasar yang menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat terhadap PAUD masih sangat rendah. Budaya kognitif merujuk pada cara pandang dan pemahaman kolektif masyarakat terhadap suatu fenomena, dalam hal ini tentang PAUD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap orang tua, guru PAUD, dan kepala sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Pucangsari masih menganggap PAUD hanya sebagai tempat bermain, bukan sebagai lembaga pendidikan yang penting. Banyak orang tua merasa bahwa pendidikan anak usia dini belum menjadi kebutuhan wajib, bahkan ada yang meyakini bahwa anak akan belajar dengan sendirinya ketika masuk TK atau SD nanti. Pemikiran seperti ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua yang sebagian besar hanya lulus SD atau SMP, serta minimnya akses terhadap informasi yang menjelaskan pentingnya masa usia dini sebagai periode emas perkembangan anak.

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Banyak ibu bekerja di luar rumah sebagai buruh, pedagang kecil, atau pekerja lepas, sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengantar anak ke sekolah. Di sisi lain, beberapa ibu rumah tangga pun enggan menyekolahkan anaknya karena merasa bisa mendidik sendiri di rumah. Mereka belum memahami bahwa PAUD bukan sekadar aktivitas bermain, melainkan tempat anak-anak belajar bersosialisasi, mengenal konsep dasar pendidikan, serta membangun kesiapan emosional dan kognitif sebelum memasuki

jenjang pendidikan formal. Beberapa orang tua bahkan beranggapan bahwa karena mereka sendiri dulu tidak ikut PAUD namun tetap bisa menyelesaikan sekolah, maka anak mereka pun tidak perlu ikut PAUD. Argumen ini memperlihatkan pola pikir masyarakat yang belum bertransformasi ke arah pemahaman pendidikan berbasis perkembangan anak. Meski sudah ada upaya edukatif seperti program SOTH, respons masyarakat masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan warga secara merata. Minimnya edukasi yang sistematis, belum adanya tokoh masyarakat yang menjadi role model pendidikan usia dini, serta lemahnya pendekatan persuasif dari aparat desa menjadikan perubahan pola pikir masyarakat berjalan sangat lambat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap situasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pucangsari, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak ke PAUD merupakan dampak dari lemahnya dukungan pada tiga pilar institusional: regulatif, normatif, dan budaya kognitif. Dari sisi regulatif, Desa Pucangsari belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur keberadaan dan penyelenggaraan PAUD. Hal ini menyebabkan PAUD tidak memiliki pijakan hukum yang kuat sebagai program resmi desa, sehingga dukungan bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Ketiadaan regulasi membuat masyarakat kurang memahami bahwa PAUD adalah bagian penting dari layanan pendidikan dasar. Pada aspek normatif, terdapat komitmen moral dari pemerintah desa dalam bentuk dukungan fasilitas, insentif guru, serta pelaksanaan kegiatan seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Namun, komitmen ini masih bersifat informal dan belum menjadi norma baku yang terlembagakan dalam sistem pemerintahan desa. Akibatnya, dukungan tersebut belum mampu membangun keterlibatan masyarakat secara luas dan konsisten. Sementara itu, pada aspek budaya kognitif, mayoritas masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Banyak orang tua menganggap PAUD hanya sebagai tempat bermain, belum sebagai lembaga pendidikan yang mendasar. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, minimnya sosialisasi, serta faktor sosial ekonomi seperti kesibukan bekerja dan ketiadaan pengantar menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan PAUD di tingkat desa memerlukan dukungan yang kuat dan menyeluruh dari tiga pilar institusional tersebut. Tanpa adanya regulasi formal, norma yang terstruktur, serta kesadaran kolektif masyarakat, PAUD akan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang komprehensif untuk membangun sistem kelembagaan PAUD yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akadira, T. (2022). Komunikasi Manajemen Dalam Peningkatan Nilai Sakip Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. *Medium*, 10(1), 235–252. [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(1\).9914](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(1).9914)
- Anggriany, E., & Hasnawati. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1239–1246. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026>
- Farnisa Wahida, P., Hari Suryaningrum, D., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2023). *the Effect of Internal Control Systems on the Innovation Intensity and Performance of Public Sector Organizations in Surabaya With Transformational Leadership As a Moderation Variable*

- Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Intensitas Inovasi Dan K. 7.*
Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, J. G., & Lilik Ekowanti, M. R. (2022). Teori Administrasi Dan Metodologi Administrasi Publik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 161–170. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v1i2.28>
- Nurkolis, N., Muhdi, M., & Yuliejantiningasih, Y. (2023). Urgensi Pengutamaan PAUD dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6313–6326. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4187>
- Reskiani, R., Mahfudnurnajamuddin, M., & Budiandriani, B. (2024). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia serta Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap Kinerja Organisasi di Sektor Pemerintahan Kota Parepare. *Jesya*, 7(2), 2063–2069. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1767>
- Sintesis, P., Berbasis, N., Dari, B., & Indonesia, L. (n.d.). *Jurnal Tunas Cendekia*. 0849, 33–39.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Alfabeta.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 175–191.
- Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Menara Ilmu*, 17(2), 41–48. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4276>
- Tanjung, F. H. (2022). Penerapan Teori Administrasi Publik Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Ipal Komunal Di Jakarta. *Reksabumi*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.33830/reksabumi.v1i2.2922.2022>
- Wardana, R. I., & Frinaldi, A. (2024). *Budaya Inovasi di Sektor Publik: Strategi, Implementasi, dan Dampaknya pada Kinerja Organisasi*. 2(4), 620–629.
- Akadira, T. (2022). Komunikasi Manajemen Dalam Peningkatan Nilai Sakip Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. *Medium*, 10(1), 235–252. [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(1\).9914](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(1).9914)
- Anggriany, E., & Hasnawati. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1239–1246. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026>
- Farnisa Wahida, P., Hari Suryaningrum, D., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2023). *the Effect of Internal Control Systems on the Innovation Intensity and Performance of Public Sector Organizations in Surabaya With Transformational Leadership As a Moderation Variable*
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Intensitas Inovasi Dan K. 7.
Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, J. G., & Lilik Ekowanti, M. R. (2022). Teori Administrasi Dan Metodologi Administrasi Publik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 1(2), 161–170. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v1i2.28>
- Nurkolis, N., Muhdi, M., & Yuliejantiningasih, Y. (2023). Urgensi Pengutamaan PAUD dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6313–6326. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4187>
- Reskiani, R., Mahfudnurnajamuddin, M., & Budiandriani, B. (2024). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia serta Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap Kinerja Organisasi di Sektor Pemerintahan Kota Parepare. *Jesya*, 7(2), 2063–2069. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1767>
- Sintesis, P., Berbasis, N., Dari, B., & Indonesia, L. (n.d.). *Jurnal Tunas Cendekia*. 0849, 33–39.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Alfabeta.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal Ilmu*

- Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 175–191.
- Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Menara Ilmu*, 17(2), 41–48. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4276>
- Tanjung, F. H. (2022). Penerapan Teori Administrasi Publik Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Ipal Komunal Di Jakarta. *Reksabumi*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.33830/reksabumi.v1i2.2922.2022>
- Wardana, R. I., & Frinaldi, A. (2024). *Budaya Inovasi di Sektor Publik : Strategi , Implementasi , dan Dampaknya pada Kinerja Organisasi*. 2(4), 620–629.